

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG A LT.1 JL. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH TELEPON : (0651) 29806 ; FAX : (0651) 22460 site :<u>www.kppnbandaaceh.net</u>

Nomor

S-00079

12 Januari 2018

Lampiran

Hal

Permohonan Persetujuan Void

WPB.01/KP.0130/2018

Yth. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan di Jakarta

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaaraan Nomor PER-5/PB/2015 tentang Mekanisme Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran dan Surat Kepala Kantor Kementarian Agama Kota Banda Aceh Nomor B-149/Kk.01.07/04/KU.01.1/01/2018 tanggal 10 Januari 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa telah terjadi kesalahan nilai dalam penerbitan SP2D GTUP Nihil sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai SP2D
1.	170011701003780	31-12-2017	01789T/299184/2017	31-12-2017	169

Berdasarkan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dilakukan pembatalan SP2D dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA

epala Kantor

KANTOR PELAYANAN RBENDAHARAAN NEGAR BANDA ACEH Ahmad Fauzi

MR 196511301985091001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Aceh 🕨



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG A LT.1 JL. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH TELEPON: (0851) 29806; FAX: (0851) 22460 site: www.kppnbandaaceh.net

Nomor

S-00101 WPB.01/KP.01/2017

15 Januari 2017

Sifat Lampiran Sangat Segera 1 (satu) lembar

Hal

Penegasan Kembali Ketentuan Mengenai

Pengajuan SPM Gaji dalam Rangka Pencegahan Gaji Dobel Bayar

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Banda Aceh

Dalam rangka mencegah gaji dobel bayar pada lingkup KPPN Banda Aceh dan merujuk pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Pengajuan SPM Gaji dengan pegawai pindah masuk wajib dilampiri Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari satker lama yang sudah disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN setempat.
- 2. Pengajuan SPM Gaji dengan pegawai pindah masuk dalam satu wilayah pembayaran KPPN Banda Aceh, wajib dilampiri SKPP yang sudah disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Banda Aceh.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor

Siswanto

NIP 197511021996021002 J

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh